



LAKIP

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN
2022

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Email : bkad.pangandarankab@gmail.com

Website : bkad.pangandarankab.go.id

Jln.Raya Cijulang No. 248 Tlp/Fak. (0265) 2640011

Cijulang 46394



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Raya Cijulang No. 248 Telp./Fax. (0265) 2640011
Pangandaran 46394 - Jawa Barat

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 700/Kpts. 0017-BKAD.1/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUP BKAD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BKAD KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas Penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim di lingkup BKAD Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkup BKAD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ; PET/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran;

17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkup BKAD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Individu dan Pelaporan Kinerja;
- b. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Individu dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja di lingkup BKAD Kabupaten Pangandaran;
- d. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja;
- e. Mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaporkan dan menyampaikan dokumen hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

KETIGA : Rincian Tugas Tim dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada DPA BKAD Kabupaten Pangandaran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 12 Januari 2023

an BUPATI PANGANDARAN
KEPALA BPKD
KABUPATEN PANGANDARAN,



HENDAR SUHENDAR S

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BKAD KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 700/Kpts. 0017-BKAD.1/2023
TANGGAL : 12 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUP BKAD KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

- I. Penanggung jawab : Kepala BKAD Kabupaten Pangandaran
II. Ketua : Sekretaris
III. Sekretaris : Fungsional Perencana
VI. Anggota : 1. Kepala Bidang;
2. Kasubid dan Kasubag;
3. Pelaksana.

KEPALA BKAD
KABUPATEN PANGANDARAN,

HENDAR SUHENDAR S

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BKAD KAB. PANGANDARAN

NOMOR : 700/Kpts. 0017 -BKAD.1/2023

TANGGAL : 12 Januari 2023

**URAIAN TUGAS TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUP BKAD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

- a. **Penanggung jawab**, bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup internal BKAD;
- b. **Ketua**, mempunyai tugas :
Mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyusunan dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja
- c. **Sekretaris**, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun jadwal penyusunan hasil evaluasi Pelaporan Kinerja;
 - 2) Membantu Ketua Tim dalam kegiatan penyusunan evaluasi Pelaporan Kinerja;
 - 3) Membantu Ketua Tim dalam membuat dokumen evaluasi Pelaporan Kinerja.
- d. **Anggota**, adalah mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi capaian dari sasaran, program kegiatan SKPD;
 - 2) Mengumpulkan data kinerja dengan mengelompokan dari hasil capaian sasaran, program kegiatan SKPD;
 - 3) Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan hasil evaluasi dari indikator, target dan realisasinya;
 - 4) Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai dengan realisasi;
 - 5) Menyusun dokumen evaluasi penyusunan Pelaporan Kinerja berdasarkan pengukuran kinerja, capaian target sasaran dan program kegiatan;
 - 6) Menyusun dokumen evaluasi penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD berdasarkan hasil dari evaluasi realisasi yang dicapai berdasarkan sasaran dan program kegiatan.

KEPALA BKAD
KABUPATEN PANGANDARAN,



HENDAR SUHENDAR S

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan karunia-Nya seluruh program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan lancar, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 mengacu kepada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban (Akuntabilitas) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dalam mengelola sumber daya dan kebijakan.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah selalu cepat dan tanggap terhadap permasalahan sekaligus mampu untuk menyelesaikan masalah Keuangan melalui Pengelolaam Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk tetap menjalin sinergitas dalam Pengelolaan Keuangan antara Pengelola APBD dan Pengguna APBD, masyarakat maupun legislatif dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

3. Menjadikan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel, beroperasi serta efektif dan efisien, mampu mendorong akuntabilitas publik pada Dinas / Badan / Kantor / Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan responsif terhadap aspirasi masyarakat guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten Pariwisata yang mendunia.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi maupun redaksinya. Walaupun demikian mudah-mudahan dokumen ini dapat menjadi media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan menjadi sumber informasi bagi pihak yang memerlukan.

Akhirnya, semoga segala upaya kami senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT, seraya terus mendorong petunjuk dan pertolongan-Nya dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah menjadi komitmen bersama khususnya dalam bidang Pengelolaan Keuangan daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Cijulang, 31 Januari 2023

KEPALA BKAD
KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641116 199303 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang diperuntukan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan wajib Bidang Pengelolaan Keuangan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Bertugas untuk perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas lain diberikan pimpinan sesuai tugas fungsinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Dari 2 (Dua) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 8 (Delapan) indikator kinerja capaiannya sebagai berikut :

- a. Capaian sebesar 100% sebanyak 2 (dua) indikator kinerja atau 25%.
- b. Capaian lebih dari 100% sebanyak 2 (dua) indikator kinerja atau 25%.
- c. Capaian kurang dari 100% sebanyak 4 (empat) indikator kinerja atau 50%.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran 2021-2026 beserta perubahannya dan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

Realisasi anggaran tahun 2022, apabila dikelompokkan per sasaran strategis dengan rata-rata capaian sebesar 91,60% dengan capaian kinerja dari 2 indikator

kinerja utama rata-rata 90,10 % dengan demikian dapat dikatakan efisien terhadap penggunaan anggaran Pemerintah Daerah.

Cijulang, 31 Januari 2023

KEPALA BKAD
KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641116 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	1
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Potensi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2
3.1. Tugas Pokok Dan Fungsi	2
3.2. Sumber Daya Manusia Aparatur BKAD	3
3.3. Potensi BKAD	4
3.4. Isu Strategis BKAD	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2. PERENCANAAN	6
2.1.1 Rencana Strategis 2021-2026	6
a. Visi Dan Misi Kabupaten Pangandaran.....	6
b. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran	7
2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2022	13
2.3 Penjanjian Kinerja Tahun 2022	14
2.4 Standar Penilaian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Realisasi anggaran	58
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Potensi BKAD	4
Tabel 2.2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kabupaten Pangandaran (2021-2026)	8
Tabel 2.2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) (2021-2026).....	11
Tabel 2.3	Perencanaan Kinerja Tahun 2022	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala BKAD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022	14
Tabel 2.5	Kategori Penilaian Kinerja	20
Tabel 3.1.1	Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	21
Tabel 3.1.2	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 (2021- 2026)	30
Tabel 3.1.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah (2021-2026).....	40
Tabel 3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional (2021-2026)	50
Tabel 3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	58
Tabel 3.1.7	Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja	58
Tabel 3.2.1	Realisasi Anggaran BKAD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022	58



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2022 penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja tahun 2022 serta Perjanjian Kinerja tahun 2022.

2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 mengacu pada :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- 7) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 8) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 9) Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor : 700/Kpts.0016-BKAD.1/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Di Lingkup BKAD Kabupaten Pangandaran.

3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Badan Keuangan dan Aset Daerah

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 99 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

3.1.1. Tugas Pokok

Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan asset daerah, meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

3.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah



menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Sumber Daya Manusia Aparatur BKAD

3.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran antara lain ditetapkan bahwa salah satu Perangkat Daerah dimaksud adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris;
 - 2) Subag Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
- e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - 2) Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

3.2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Susunan Kepegawaian.

Jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam tahun 2022 adalah 51 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menurut status :



- 1) PNS : 21 orang
- 2) CPNS : 3 orang
- 3) Tenaga Honorer : 27 orang
- b. Menurut Golongan :
 - 1) Golongan IV : 5 orang
 - 2) Golongan III : 16 orang
 - 3) Golongan II : 3 orang
 - 4) Golongan I : - orang
- c. Menurut pendidikan :
 - 1) Pasca Sarjana : 11 orang
 - 2) Sarjana : 9 orang
 - 3) Diploma : 2 orang
 - 4) SLTA : 3 orang
 - 5) SLTP : 0 orang
 - 6) SD : 0 orang
- b. Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Jabatan :
 - 1) DIKLATPIM II : 0 orang
 - 2) DIKLATPIM III : 1 orang
 - 3) DIKLATPIM IV : 1 orang

3.3. Potensi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa potensi yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Potensi BKAD

No	Bidang	Potensi
1.	Akuntansi dan Pelaporan	Sumber Daya Manusia, Aplikasi E-bend, Regulasi Pengelolaan Keuangan
2.	Anggaran	Sumber Daya Manusia, Aplikasi SIPD, E-bend, Regulasi Pengelolaan Keuangan
3.	Aset Daerah	Sumber Daya Manusia, Aplikasi Sistem Informasi BMD, Aset Daerah Kabupaten Pangandaran



1.4. ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis yang sedang di hadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan dan Aset yang transparan dan Akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah;
3. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

2.1.1 Rencana Strategis 2021 - 2026

Pada tahun 2022 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

a. Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran

Visi Kabupaten Pangandaran dengan penjelasan sebagai berikut :

**"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang
Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa".**

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi.

Adapun yang menjadi misi Bupati Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026 adalah:



- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;
- 2) Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- 3) Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas;
- 4) Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan local;
- 5) Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing;
- 6) Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan;

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu dalam point Membantu Bupati untuk mencapai tatakelola yang efektif, akuntabel dan transparan, melalui peningkatan pengelolaan keuangan (*Good Government*).

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas pembangunan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :



Tabel 2.2.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pangandaran (2021-2026)**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						
					2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	89,78	68	70	72	74	76	78
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	4,5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
				Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20	20	20	20	20	20	20
				Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	4,5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
				Indeks Penyerapan Anggaran Daerah	20	20	20	20	20	20	20
				Indeks Kondisi Keuangan Daerah	5	6	6,5	7	7	8	8
				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir

Kondisi awal berdasarkan hasil evaluasi penilaian Akuntabilitas kinerja Tahun 2021 untuk BKAD memperoleh nilai 66. Mengacu pada Surat Edaran dari Inspektorat,



bahwa berdasarkan Surat Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/287/AA.05/2022 tanggal 31 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 bahwa hasil evaluasi menunjukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai 66,73 atau predikat B.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerbitkan Peraturan Daerah Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut maka Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran disusun seluruhnya dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil dengan indikator tujuan, indikator sasaran dan target kinerja yang baik (SMART), Target kinerja ditetapkan dengan baik, Renstra harus dijadikan acuan dalam dokumen perencanaan, Sasaran harus berorientasi hasil dan Indikator kinerja sasaran, program dan hasil (outcome) memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja



pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts.124/BKAD/2022 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerbitkan Peraturan Daerah Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran telah menyusun Renstra yang didalamnya terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026.

Tabel 2.2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) (2021-2026)

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET KINERJA					
						2021 (kondisi awal)	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	$\frac{\text{Nilai Akuntabilitas Kinerja BPFD (n-1)} - \text{Nilai Akuntabilitas Kinerja BPFD (n-2)}}{\text{Nilai Akuntabilitas Kinerja BPFD (n-2)}} \times 100$	LHE SAKIP	68	70	72	74	76	78
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Indeks	Skor Rata - Rata x Bobot	PROVINSI JABAR	5	5,5	5,5	6	6	6,5
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	Indeks	Skor Rata - Rata x Bobot	PROVINSI JABAR	20	20	20	20	20	20
		Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Skor Rata - Rata x Bobot	PROVINSI JABAR	5	5,5	5,5	6	6	6,5
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah	Indeks	Skor Rata - Rata x Bobot	PROVINSI JABAR	20	20	20	20	20	20



NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET KINERJA					
						2021 (kondisi awal)	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Indeks	Indeks Kondisi Keuangan x Bobot	PROVINSI JABAR	6	6,5	7	7	8	8
				WTP : Wajar Tanpa Pengecualian, Merupakan predikat tertinggi BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik. WDP : Wajar Dengan Pengecualian, Merupakan predikat menengah BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah cukup baik, namun ada beberapa yang harus diperbaiki. Disclaimer : Merupakan predikat terendah BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah buruk, banyak yang harus diperbaiki.	LHP BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Waktu	Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) selesai Maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Bidang Aset	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir



2.3 Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Kebijaksanaan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tabel 2.3
Perencanaan Kinerja Tahun 2022

No	Kebijakan	Program
1.	Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran	
3.	Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur.	



4.	Efektifitas pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen yang profesional.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan administrasi BMD yang terintegasi	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang sangat perlu dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Perangkat Daerah yang tidak terarah.

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian kerja antara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dengan Bupati Pangandaran. Perjanjian Kinerja ini yang akan dijadikan indikator kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Uraian lengkap Perjanjian Kinerja 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala BKAD
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (2021-2026)



No	Sasaran		Satuan	Target
	Uraian	Indikator		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran	Nilai LHE AKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	70

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91%	9.202.491.576
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	97%	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85%	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	92%	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	95%	163.400.000
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	95%	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	95%	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	96.000.000
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	67.400.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	85%	6.109.186.378
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.046.686.378
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	45.000.000
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	7.500.000
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	78%	45.000.000
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	45.000.000
1.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	5%	2.800.000
1.4.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	11 Dokumen	2.800.000
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	95%	99.800.000
1.5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	99.800.000
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	92%	338.420.000



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.000.000
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	170.420.000
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	27%	568.483.250
1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	42.000.000
1.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	158.300.096
1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	268.183.154
1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90%	1.048.437.044
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000
1.8.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	669.990.252
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	374.446.792
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	94%	826.964.904
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	383.814.904
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit	22.000.000
1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	221.150.000
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	200.000.000

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (2021-2026)

No	Sasaran		Satuan	Target
	Uraian	Indikator		
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Indeks	5,5
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	Indeks	20
		Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	5
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah	Indeks	20



No	Sasaran		Satuan	Target
	Uraian	Indikator		
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Indeks	6,5
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP
		Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	Waktu	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	85%	219.025.939.364
		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100	
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA	100%	4.456.940.000
		Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100%	
		Persentase skpd yang melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan anggaran	94%	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	244.800.000
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	250.000.000
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	309.210.000
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	324.522.500
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	379.390.000
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	429.380.000
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	563.700.000
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Dokumen	762.040.000
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	429.000.000
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25 Dokumen	204.800.000
2.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	29 Dokumen	110.097.500
2.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	20 Dokumen	100.000.000
2.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Orang	350.000.000
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	85%	863.665.000
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	482.075.000



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
2.2.5	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	35 Dokumen	217.538.000
2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4700 Dokumen	164.052.000
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Peresentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)	80%	2.064.535.000
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	260.032.000
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	45.500.000
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	450.719.000
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	832.299.000
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen	475.985.000
2.3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	0
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	87%	211.193.248.364
2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	198.219.199.154
2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	287.197.000
2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	93 Laporan	12.686.852.210
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100%	447.551.000
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	96.799.000
2.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	350.752.000
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah	90%	4.534.412.159
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	95%	4.534.412.159
		Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar	100%	
3.1.3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	37.558.919



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
3.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.000.000
3.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	89.665.000
3.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.033.038.500
3.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	660.464.750
3.1.11	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	2.016.389.990
3.1.12	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	313.895.000
3.1.13	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan	133.400.000
3.1.14	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Orang	200.000.000
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	0%	655.505.000
		Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	0%	
		Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	0%	
4.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutahirkan	0%	655.505.000
		persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	0%	
		Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	0Wajib Pajak	
		persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	0%	
		Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	0Dokumen	
		Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	0%	
4.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	15.425.000
4.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	582.500.000
4.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0
4.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Unit	0
4.1.5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	5.780.000
4.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 Laporan	0



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	
			Kinerja	Anggaran
4.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0 Obyek Pajak	0
4.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0 Dokumen	7.000.000
4.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	11.200.000
4.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	0 Dokumen	0
4.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0 Dokumen	33.600.000
4.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0 Dokumen	0
4.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Dokumen	0
4.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	0

2.5 Standar Penilaian Kinerja

Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022 diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja setiap tahun serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Pencapaian kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan mengetahui tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan menjadi empat kategori yaitu:

Tabel 2.5
Kategori Penilaian Kinerja

No	Rentang Nilai Persentase	Kategori Capaian
1.	91 sampai dengan ≥ 100	Tercapai / Berhasil
2.	71 sampai dengan 90	Cukup Tercapai / Cukup Berhasil
3.	51 sampai dengan 70	Kurang Tercapai / Kurang Berhasil
4.	≤ 51	Tidak Tercapai / Tidak Berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan Sasaran Strategis dilakukan dengan :

3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1.1

Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
I	Keuangan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (2022-2026)	Nilai LHE AKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah*	70	233.418.348,099		213.808.421,901		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91%	9.202.491.576	66,00	8.110.612.614	94,29	
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	97%		78,46%		86,22	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur yang berkualitas	85%		100%		103,09	88,13
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	92%		95%		111,76	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	95%	163.400.000	100,25%	8.110.612.614	108,97	
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	95%		100%		105,26	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	95%		100%		105,26	58,12
						94.965.500	105,26	
							105,26	

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	96.000.000	6 Dokumen	42.700.500	44,48
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	67.400.000	4 Laporan	52.265.000	77,54
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	85%	6.109.186.378	100%	5.784.379.272	94,68
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.046.686.378	40 Orang/bulan	5.751.037.772	95,11
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	31.263.500	69,47
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	1.905.000	19,05
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	173.000	2,31
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	78%	45.000.000	70%	19.406.000	43,12
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	19.406.000	43,12
1.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	5%	2.800.000	0%	2.758.000	98,50
1.4.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	11 Dokumen	2.800.000	1 Dokumen	2.758.000	98,50
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	95%	99.800.000	100%	38.028.500	38,10

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	99.800.000	4 Dokumen	38.028.500	38,10
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	92%	338.420.000	100%	251.795.359	74,40
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	1 Paket	4.434.000	73,90
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	1 Paket	122.875.000	98,30
1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	30.000.000	3 Paket	24.592.100	81,97
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	5.850.000	83,57
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	170.420.000	38 Laporan	94.044.259	55,18
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	27%	568.483.250	96,45%	520.962.330	91,64
1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	42.000.000	1 Unit	39.656.250	94,42
1.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	158.300.096	90 Unit	149.850.000	94,66
1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	268.183.154	16 Unit	236.456.080	88,17
1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	3 Unit	95.000.000	95,00
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90%	1.048.437.044	100%	815.851.720	77,82
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	3.787.500	94,69
1.8.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	669.990.252	12 Laporan	578.055.220	86,28

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	374.446.792	12 Laporan	234.009.000	62,49
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	94%	826.964.904	100%	582.465.933	70,43
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	383.814.904	112 Unit	259.936.433	67,72
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit	22.000.000	24 Unit	14.060.000	63,91
1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	221.150.000	100 Unit	109.656.000	49,58
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	7 Unit	200.000.000	9 Unit	198.813.500	99,41
II	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat (2022-2026)	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran "	5,5	224.215.856.523	6,02	205.697.809.287	109,45
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD "	20		18,45		92,24
		Indeks Transparasi Pengelolaan Keuangan Daerah "	5,5		6,21		112,91
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah "	20		10,00		50,00
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah "	6,5		2,38		36,62
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah "	WTP		WTP		100,00
		Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu "	Max 3 bn setelah tin anggarannya berakhir		31 Maret 2021		100,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	85%	219.025.939.364	92%	201.905.851.563	108,24
		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100		100		100,00

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Angggaran	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	% Angggaran
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA	100%		100%		100,00	
		Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100%		100%		100,00	90,38
		Persentase skpd yang melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan anggaran	94%	4.456.940.000	100%	4.028.122.914	106,38	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	244.800.000	2 Dokumen	244.800.000	100,00	100,00
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	244.800.000	100,00	97,92
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	309.210.000	16 Dokumen	306.000.000	44,44	98,96
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	324.522.500	35 Dokumen	313.200.000	100,00	96,51
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	379.390.000	21 Dokumen	368.194.500	60,00	97,05
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	429.380.000	35 Dokumen	377.100.000	100,00	87,82
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	563.700.000	33 Dokumen	515.293.765	1650,00	91,41
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Dokumen	762.040.000	8 Dokumen	676.087.879	66,67	88,72
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	429.000.000	1 Dokumen	380.483.000	25,00	88,69
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25 Dokumen	204.800.000	1 Dokumen	167.554.915	4,00	81,81
2.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	29 Dokumen	110.097.500	2 Dokumen	75.228.855	6,90	68,33
2.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	20 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	90.980.000	0,00	90,98

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Orang	350.000.000	35 Orang	268.400.000	76,69
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Percentage PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang terbit dan sesuai ketentuan	85%	863.665.000	100%	800.419.650	92,68
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	482.075.000	12 Dokumen	473.331.500	98,19
2.2.5	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	35 Dokumen	217.538.000	35 Dokumen	201.239.150	92,51
2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4700 Dokumen	164.052.000	5697 Dokumen	125.849.000	76,71
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akruel)	80%	2.064.535.000	92%	2.021.188.400	97,90
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	260.032.000	12 Laporan	252.500.000	97,10
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	45.500.000	12 Dokumen	41.030.500	90,18
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	450.719.000	10 Laporan	432.679.000	96,00
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	832.299.000	9 Laporan	825.902.500	99,23

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen	475.985.000	12 Dokumen	469.076.400	98,55
2.3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00
2.4	Kegiatan Penunjang Unsur Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	87%	211.193.248.364	58,31%	194.693.381.599	51,01
2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	198.219.199.154	12 Laporan	190.622.597.013	52,54
2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	287.197.000	0 Laporan	0	0,00
2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	93 Laporan	12.686.852.210	93 Laporan	4.070.784.586	32,09
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100%	447.551.000	100%	362.739.000	81,05
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	96.799.000	12 Dokumen	57.096.500	58,98
2.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	350.752.000	20 Dokumen	305.642.500	87,14
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah	90%	4.534.412.159	100%	3.235.733.224	71,36
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir Presentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar	95% 100%	4.534.412.159	100,01% 100%	3.235.733.224	105,27 100,00

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
3.1.3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	37.558.919	1 Dokumen	15.445.000	100,00	41,12
3.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	45.335.000	100,00	90,67
3.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	89.665.000	1 Laporan	58.359.234	100,00	65,09
3.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.033.038.500	1 Laporan	1.012.642.208	100,00	98,03
3.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	660.464.750	9 Laporan	478.136.820	75,00	72,39
3.1.11	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	2.016.389.990	12 Dokumen	1.034.871.616	100,00	51,32
3.1.12	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	313.895.000	12 Laporan	273.444.460	100,00	87,11
3.1.13	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan	133.400.000	10 Laporan	117.497.886	83,33	88,08
3.1.14	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Orang	200.000.000	0 Orang	200.000.000	0,00	100,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	0%		0%		0%	
		Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	0%	655.505.000	0%	556.224.500	0%	84,85
		Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	0%		0%		0%	
4.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	0%		0%		0%	
		Persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	0%	655.505.000	0%	556.224.500	0%	84,85

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%		
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			0Wajib Pajak		0Wajib Pajak		0%		
		Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	0%			0%			
		persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	0%			0%			
		Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	0Dokumen						
		Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	0%						
4.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	15.425.000	0 Dokumen	12.022.500	0,00	77,94	
4.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	582.500.000	0 Dokumen	487.630.000	0,00	83,71	
4.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0,00	0,00
4.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Unit		0	0 Unit	0	0,00	0,00
4.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	5.780.000	0 Laporan	5.780.000	0,00	100,00	
4.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0,00	0,00
4.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0 Obyek Pajak		0	0 Obyek Pajak	7.000.000	0,00	0,00
4.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0 Dokumen	7.000.000	0 Dokumen	0	0,00	0,00	
4.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	11.200.000	0 Layanan	10.192.000	0,00	91,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
4.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0 Dokumen	33.600.000	0 Dokumen	33.600.000	0,00	100,00
4.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0,00	0,00

Sumber : (1) Jemberkab.go.id, Pangandaran tahun 2021
 (**) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021
 (***) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2021
 (****) Bidang Aset BKAD Kab. Pangandaran

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022

Tabel 3.1.2
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022
(2021-2026)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	REALISASI
				2021	2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	70	66	-
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	5,5	6,02	-
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20	18,45	-

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2021	REALISASI 2022
		Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	5,5	6,21	-
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah	20	10,00	-
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	6,5	2,38	-
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	-
		Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	Max 3 bin setelah ttn anggaran berakhir	31 Maret 2021	-

Sumber : (*) Inspektorat kab. Pangandaran
(**) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
(***) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(****) Bidang Aset BMD kab. Pangandaran
(*****) Bidang Akuntansi dan Pelaporan BMD kab. Pangandaran

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Kinerjanya	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91%	233.418.348.099	78,46%	213.808.421.901	86,22	
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	97%		100%		103,09	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85%	9.202.491.576	95%	8.110.612.614	111,76	88,13
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	92%		100,25%		108,97	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	95%	163.400.000	100%	94.965.500	105,26	58,12



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	95%		100%		105,26	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	95%		100%		105,26	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	96.000.000	6 Dokumen	42.700.500	150,00	44,48
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	67.400.000	4 Laporan	52.265.000	100,00	77,54
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	85%	6.109.186.378	100%	5.784.379.272	117,65	94,68
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.046.686.378	40 Orang/bulan	5.751.037.772	80,00	95,11
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	31.263.500	100,00	69,47
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	1.905.000	100,00	19,05
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	173.000	100,00	2,31
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	78%	45.000.000	70%	19.406.000	89,74	43,12
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	19.406.000	100,00	43,12
1.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	5%	2.800.000	0%	2.758.000	0,00	98,50

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.4.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	11 Dokumen	2.800.000	1 Dokumen	2.758.000	9,09	98,50
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	95%	99.800.000	100%	38.028.500	105,26	38,10
1.5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	99.800.000	4 Dokumen	38.028.500	80,00	38,10
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	92%	338.420.000	100%	251.795.359	108,70	74,40
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	1 Paket	4.434.000	100,00	73,90
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	1 Paket	122.875.000	100,00	98,30
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	3 Paket	24.592.100	100,00	81,97
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	5.850.000	100,00	83,57
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	170.420.000	38 Laporan	94.044.259	38,00	55,18
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	27%	568.483.250	96,45%	520.962.330	357,22	91,64
1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	42.000.000	1 Unit	39.656.250	100,00	94,42
1.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	158.300.096	90 Unit	149.850.000	120,00	94,66
1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	268.183.154	16 Unit	236.456.080	88,89	88,17
1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	3 Unit	95.000.000	150,00	95,00
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90%	1.048.437.044	100%	815.851.720	111,11	77,82

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Anggarannya	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	% Anggarannya
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	3.787.500	100,00	94,69
1.8.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	669.990.252	12 Laporan	578.055.220	100,00	86,28
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	374.446.792	12 Laporan	234.009.000	100,00	62,49
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase prasarana yang baik dan layak fungsi	94%	826.964.904	100%	582.465.933	106,38	70,43
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	383.814.904	112 Unit	259.936.433	186,67	67,72
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit	22.000.000	24 Unit	14.060.000	32,00	63,91
1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	221.150.000	100 Unit	109.656.000	400,00	49,58
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	200.000.000	9 Unit	198.813.500	128,57	99,41
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Percentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	85%	219.025.939.364	92%	201.905.851.563	108,24	52,47
		Percentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100		100		100,00	
		Percentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA	100%		100%		100,00	
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Percentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100%	4.456.940.000	100%	4.028.122.914	100,00	90,38
		Percentase skpd yang melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan anggaran	94%		100%		106,38	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	244.800.000	2 Dokumen	244.800.000	100,00	100,00

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Anggaran
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	244.800.000	97,92
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	309.210.000	16 Dokumen	306.000.000	98,96
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	324.522.500	35 Dokumen	313.200.000	96,51
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	379.390.000	21 Dokumen	368.194.500	97,05
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	429.380.000	35 Dokumen	377.100.000	87,82
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	563.700.000	33 Dokumen	515.293.765	91,41
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12 Dokumen	762.040.000	8 Dokumen	676.087.879	88,72
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	429.000.000	1 Dokumen	380.483.000	88,69
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25 Dokumen	204.800.000	1 Dokumen	167.554.915	81,81
2.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	29 Dokumen	110.097.500	2 Dokumen	75.228.855	68,33
2.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	20 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	90.980.000	90,98
2.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	35 Orang	350.000.000	35 Orang	268.400.000	76,69
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	85%	863.665.000	100%	800.419.650	92,68

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	482.075.000	12 Dokumen	473.331.500	100,00	96,19
2.2.5	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	35 Dokumen	217.538.000	35 Dokumen	201.239.150	100,00	92,51
2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	4700 Dokumen	164.052.000	5697 Dokumen	125.849.000	121,21	76,71
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akruai)	80%	2.064.535.000	92%	2.021.188.400	115,00	97,90
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	260.032.000	12 Laporan	252.500.000	100,00	97,10
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	45.500.000	12 Dokumen	41.030.500	100,00	90,18
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	450.719.000	10 Laporan	432.679.000	83,33	96,00
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	832.299.000	9 laporan	825.902.500	75,00	99,23
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	12 Dokumen	475.985.000	12 Dokumen	469.076.400	100,00	98,55



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Anggaran	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00	0,00
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	87%	211.193.248.364	58,31%	194.693.381.599	67,02	51,01
2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	198.219.199.154	12 Laporan	190.622.597.013	100,00	52,54
2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	287.197.000	0 Laporan	0	0,00	0,00
2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	93 Laporan	12.686.852.210	93 Laporan	4.070.784.586	100,00	32,09
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100%	447.551.000	100%	362.739.000	100,00	81,05
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	96.799.000	12 Dokumen	57.096.500	100,00	58,98
2.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	350.752.000	20 Dokumen	305.642.500	166,67	87,14
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah	90%	4.534.412.159	100%	3.235.733.224	111,11	71,36
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	95%	4.534.412.159	100,01%	3.235.733.224	105,27	71,36
3.1.3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar	100%	4.534.412.159	100%	3.235.733.224	100,00	
3.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	37.558.919	1 Dokumen	15.446.000	100,00	41,12
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	45.335.000	100,00	90,67

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Kinerja	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
3.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	89.665.000	1 Laporan	58.359.234	100,00	65,09
3.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.033.038.500	1 Laporan	1.012.642.208	100,00	98,03
3.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	660.464.750	9 Laporan	478.136.820	75,00	72,39
3.1.11	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	2.016.389.990	12 Dokumen	1.034.871.616	100,00	51,32
3.1.12	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	313.895.000	12 Laporan	273.444.460	100,00	87,11
3.1.13	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan	133.400.000	10 Laporan	117.497.886	83,33	88,08
3.1.14	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	35 Orang	200.000.000	0 Orang	200.000.000	0,00	100,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	0%		0%		0%	
		Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	0%	655.505.000	0%	556.224.500	0%	84,85
		Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	0%		0%		0%	
		Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	0%		0%		0%	
4.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	0%	655.505.000	0%	556.224.500	0%	84,85
		Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	0Wajib Pajak		0Wajib Pajak		0%	

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Anggarannya	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	0%		0%		0%	
		Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	0Dokumen		0Dokumen		0%	
		Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	0%		0%		0%	
4.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	15.425.000	0 Dokumen	12.022.500	0,00	77,94
4.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	582.500.000	0 Dokumen	487.630.000	0,00	83,71
4.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0,00	0,00
4.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Unit	0	0 Unit	0	0,00	0,00
4.1.5	Pendataan dan Pendaftran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	5.780.000	0 Laporan	5.780.000	0,00	100,00
4.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0,00	0,00
4.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NIOP nya	0 Obyek Pajak	0	0 Obyek Pajak	7.000.000	0,00	0,00
4.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0 Dokumen	7.000.000	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	11.200.000	0 Layanan	10.192.000	0,00	91,00
4.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Anggarannya	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
4.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0 Dokumen	33.600.000	0 Dokumen	33.600.000	0,00	100,00
4.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0,00	0,00

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah

Tabel 3.1.3

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah (2021-2026)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Jangka menengah	Realisasi s.d tahun 2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai LHE AKTP Badan Keuangan dan Aset Daerah*	78	66
2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatkan	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**	6,5	6,02
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD**	20	18,45
		Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**	6,5	6,21
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah**	20	10,00

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Jangka menengah	Realisasi s.d tahun 2022
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah**	8	2,38
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah***	WTP	WTP
		Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu****	Max 3 bin setelah thn anggaran berakhir	31 Maret 2021

Sumber : (*) Jaspokortab, Pangandaran tahun 2021
 (**) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021
 (***) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2021
 (****) Bidang Aset BKAD Kab. Pangandaran

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% REALISASI	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Keuangan	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		233.418.348.099		213.808.421.901		
			91%		78,46%		86,22	
			97%		100%		103,09	
			85%	9.202.491.576	95%	8.110.612.614	111,76	88,13
			92%		100,25%		108,97	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	95%		100%		105,26	
			95%	163.400.000	100%	94.965.500	105,26	58,12
			95%		100%		105,26	

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	96.000.000	6 Dokumen	42.700.500	44,48
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	67.400.000	4 Laporan	52.265.000	77,54
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	85%	6.109.186.378	100%	5.784.379.272	94,68
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.046.686.378	40 Orang/bulan	5.751.037.772	80,00
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	31.263.500	69,47
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	1.905.000	100,00
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	173.000	2,31
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	78%	45.000.000	70%	19.406.000	89,74
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	19.406.000	100,00
1.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	5%	2.800.000	0%	2.758.000	0,00
1.4.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	11 Dokumen	2.800.000	1 Dokumen	2.758.000	9,09
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	95%	99.800.000	100%	38.028.500	105,26

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Anggaran
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	5 Dokumen	99.800.000	4 Dokumen	38.028.500	38,10
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	92%	338.420.000	100%	251.795.359	74,40
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	1 Paket	4.434.000	73,90
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	1 Paket	122.875.000	98,30
1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	3 Paket	24.592.100	81,97
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	5.850.000	83,57
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	170.420.000	38 Laporan	94.044.259	55,18
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	27%	568.483.250	96,45%	520.962.330	91,64
1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	42.000.000	1 Unit	39.656.250	94,42
1.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	158.300.096	90 Unit	149.850.000	94,66
1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	268.183.154	16 Unit	236.456.080	88,17
1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	3 Unit	95.000.000	95,00
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90%	1.048.437.044	100%	815.851.720	77,82
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	3.787.500	94,69
1.8.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	669.990.252	12 Laporan	578.055.220	86,28

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	374.446.792	12 Laporan	234.009.000	100,00	62,49
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	94%	826.964.904	100%	582.465.933	106,38	70,43
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya	60 Unit	383.814.904	112 Unit	259.936.433	186,67	67,72
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit	22.000.000	24 Unit	14.060.000	32,00	63,91
1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	221.150.000	100 Unit	109.656.000	400,00	49,58
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	200.000.000	9 Unit	198.813.500	128,57	99,41
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	85%	219.025.939.364	92%	201.905.851.563	108,24	52,47
		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100		100			
		Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA	100%		100%			
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100%	4.456.940.000	100%	4.028.122.914	100,00	90,38
		Persentase skpd yang melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan anggaran	94%		100%			
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	244.800.000	2 Dokumen	244.800.000	100,00	100,00
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	244.800.000	100,00	97,92
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	309.210.000	16 Dokumen	306.000.000	44,44	98,96

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% REALISASI	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	324.522.500	35 Dokumen	313.200.000	100,00	96,51
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	379.390.000	21 Dokumen	368.194.500	60,00	97,05
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	429.380.000	35 Dokumen	377.100.000	100,00	87,82
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	563.700.000	33 Dokumen	515.293.765	1650,00	91,41
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Dokumen	762.040.000	8 Dokumen	676.087.879	66,67	88,72
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	429.000.000	1 Dokumen	380.483.000	25,00	88,69
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25 Dokumen	204.800.000	1 Dokumen	167.554.915	4,00	81,81
2.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	29 Dokumen	110.097.500	2 Dokumen	75.228.855	6,90	68,33
2.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	20 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	90.980.000	0,00	90,98
2.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	35 Orang	350.000.000	35 Orang	268.400.000	100,00	76,69
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Pembendaharaan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	85%	863.665.000	100%	800.419.650	117,65	92,68
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	482.075.000	12 Dokumen	473.331.500	100,00	98,19
2.2.5	Penatausahaan Pembayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	35 Dokumen	217.538.000	35 Dokumen	201.239.150	100,00	92,51

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Anggaran
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4700 Dokumen	164.052.000	5697 Dokumen	125.849.000	76,71
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Aktual)	80%	2.064.535.000	92%	2.021.188.400	97,90
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	260.032.000	12 Laporan	252.500.000	97,10
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	45.500.000	12 Dokumen	41.030.500	90,18
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	450.719.000	10 Laporan	432.679.000	83,33
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	832.299.000	9 laporan	825.902.500	99,23
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen	475.985.000	12 Dokumen	469.076.400	98,55
2.3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	87%	211.193.248.364	58,31%	194.693.381.599	67,02
							51,01

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	198.219.199.154	12 Laporan	190.622.597.013	100,00	52,54
2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	287.197.000	0 Laporan	0	0,00	0,00
2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	93 Laporan	12.686.852.210	93 Laporan	4.070.784.586	100,00	32,09
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100%	447.551.000	100%	362.739.000	100,00	81,05
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	96.799.000	12 Dokumen	57.096.500	100,00	58,98
2.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	350.752.000	20 Dokumen	305.642.500	166,67	87,14
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah	90%	4.534.412.159	100%	3.235.733.224	111,11	71,36
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	95%		100,01%		105,27	71,36
		Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar	100%	4.534.412.159	100%	3.235.733.224	100,00	
3.1.3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	37.558.919	1 Dokumen	15.446.000	100,00	41,12
3.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	45.335.000	100,00	90,67
3.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	89.665.000	1 Laporan	58.359.234	100,00	65,09
3.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.033.038.500	1 Laporan	1.012.642.208	100,00	98,03
3.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	660.464.750	9 Laporan	478.136.820	75,00	72,39

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Anggarannya	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	% Anggarannya
3.1.11	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	2.016.389.990	12 Dokumen	1.034.871.616	100,00	51,32
3.1.12	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	313.895.000	12 Laporan	273.444.460	100,00	87,11
3.1.13	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan	133.400.000	10 Laporan	117.497.886	83,33	88,08
3.1.14	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Orang	200.000.000	0 Orang	200.000.000	0,00	100,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	0%		0%		0%	
		Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	0%	655.505.000	0%	556.224.500	0%	84,85
		Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	0%		0%		0%	
4.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	0%		0%		0%	
		Persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	0%		0%		0%	
		Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	0Wajib Pajak		0Wajib Pajak		0%	
		Persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	0%	655.505.000	0%	556.224.500	0%	84,85
		Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	0Dokumen		0Dokumen		0%	
		Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	0%		0%		0%	



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Anggarannya	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
4.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	15.425.000	0 Dokumen	12.022.500	0,00	77,94
4.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	582.500.000	0 Dokumen	487.630.000	0,00	83,71
4.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0,00	0,00
4.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Unit	0	0 Unit	0	0,00	0,00
4.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	5.780.000	0 Laporan	5.780.000	0,00	100,00
4.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0,00	0,00
4.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disusulkan NIOP nya	0 Obyek Pajak	0	0 Obyek Pajak	7.000.000	0,00	0,00
4.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0 Dokumen	7.000.000	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	11.200.000	0 Layanan	10.192.000	0,00	91,00
4.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0 Dokumen	33.600.000	0 Dokumen	33.600.000	0,00	100,00
4.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
4.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan		0 Laporan	0	0,00	0,00

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional
(2021-2026)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realisasi s.d tahun 2022	Standar Nasional
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah*	66	-
2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**	6,02	-
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD**	18,45	-
		Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**	6,21	-
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah**	10,00	-
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah**	2,38	-
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah***	WTP	-
		Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu****	31 Maret 2021	-

Sumber : (*) Inspektorat Kab. Pangandaran tahun 2021
(**) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021
(***) Badan Perwakilan Keuangan Kabupaten Pangandaran, Indonesia tahun 2021
(****) Bidang Aset BMD Kab. Pangandaran



3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan pada tahun 2022

Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

a. 3.1.5.b Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan pada tahun 2022

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

a. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut diterapkan satu indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1.5.b.1
IKU 1.1 Nilai AKIP SKPD

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai LHE AKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	70	66	94,29%

*) Penilaian tahun 2021

Dari tabel 3.1.5.b.1 pencapaian IKU 1.1 yaitu Nilai AKIP SKPD dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Pangandaran untuk tahun 2021, mendapatkan skor 66 atau termasuk kategori nilai B, dengan demikian capaian terhadap IKU 1.1 adalah tidak memenuhi target.

Faktor pendukung/Keberhasilan tercapainya target Nilai AKIP SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dari segi perencanaan kinerja Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra telah



disusun dan memenuhi kriteria yang baik. Dari segi Pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran telah memenuhi kriteria yang baik dan berorientasi hasil. Dari segi Pelaporan Kinerja (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu sebagian besar telah menyajikan pencapaian atas kinerja dan berorientasi *outcome*. dan untuk pemanfaatan informasi kinerja telah disajikan secara ekstensif.

Faktor penghambat/kegagalan dalam meraih target Nilai AKIP SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam menentukan penetapan target kinerja, monitoring rencana aksi atas kinerja secara periodik belum dapat menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja secara berkala (bulan/triwulan). Implementasi pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimonitor secara berkala dan hasil pengukuran (capaian) kinerja belum di manfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Karena adanya peraturan baru tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari yang sebelumnya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari Peraturan terbaru terdapat tambahan dan perubahan komponen evaluasi yang sebelumnya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja menjadi 4 (empat) komponen yaitu Perencanaan KInerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Solusi agar target nilai AKIP SKPD dapat menjadi lebih baik lagi maka perlu dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Pedoman Teknis perencanaan kinerja, Rentra Tahun 2021-2026, Renja Tahun 2021, Rencana Aksi Tahun 2021 dan RKA Tahun 2021 dipublikasikan tepat waktu. Melakukan Revisi beberapa indicator kinerja sasaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran yang belum memenuhi kriteria SMART, *sustainable*, *achievable*, menantang, realistis diantaranya : Penyusunan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) sesuai SAP, Peningkatan sertifikasi tanah BMD, Peningkatan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan.



b. Pengukuran Kinerja

1. Dibuatnya pedoman teknis/SOP tentang pengukuran kinerja
2. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sesuai perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.
3. Pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).
4. Pengukuran Kinerja (aspek kinerja) dapat diimplementasikan dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
5. Pengukuran kinerja dapat menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik structural maupun fungsional
6. Penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, dan penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja atas hasil pengukuran kinerja dapat didokumentasikan secara memadai
7. Efisiensi atas pengajuan anggaran dalam mencapai kinerja dapat didokumentasikan secara memadai

c. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja dipublikasikan pada *website* atau media resmi lainnya secara tepat waktu.
2. Laporan kinerja menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan
3. Laporan kinerja yang disusun belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

- b. Sasaran 2 : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat
Untuk mencapai sasaran tersebut diterapkan satu indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1.5.b.2

IKU 2.1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	5,5	6,02	109,45%
Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20	18,45	92,25%



Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	5,5	6,21	112,91%
Indeks Penyerapan Anggaran Daerah	20	10,00	50%
Indeks Kondisi Keuangan Daerah	6,5	2,38	36,62%
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%
Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	Max 3 bln setelah thn anggaran berakhir	31 Maret 2021	100%

*) Penilaian tahun 2021

1. Dari pencapaian IKU yaitu Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dari target 5,5 mencapai realisasi 6,02 dengan capaian 109,45%. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelebihan dan kelemahan, diantaranya :
 - a. Faktor pendukung dari pencapaian target Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu sudah terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran
 - b. Faktor Penghambat dari pencapaian target Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu Ada Kegiatan Berdasarkan kegiatan yang sifatnya urgent harus masuk ke APBD sedangkan dalam perencanaan awal tidak ada.
 - c. Solusi dari factor penghambat diatas yaitu dengan memperkuat perencanaan awal sehingga tidak ada lagi program/kegiatan yang sifatnya prioritas dan urgent tidak masuk pada APBD.
2. Dari pencapaian IKU yaitu Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD dari target 20, mencapai realisasi 18,45 dengan capaian indeks 92,25%. Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD tidak mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelebihan dan kelemahan, diantaranya :



- a. Faktor Pendukung dari pencapaian target Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD yaitu besaran pengalokasian untuk belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan sudah sesuai dengan alokasinya;
- b. Faktor penghambat dari pencapaian target Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD yaitu alokasi anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) data pendukungnya tidak sesuai dan ada alokasi anggaran untuk belanja urusan bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tidak terpenuhi.
- c. Solusi dari factor penghambat di atas menyusun alokasi anggaran dari perencanaan, penganggaran serta teknis pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dan melaksanakannya sesuai aturan.
3. Dari pencapaian IKU yaitu Indeks Transparansi pengelolaan keuangan Daerah dari target 5,5 mencapai realisasi 6,21 dengan capaian indeks 112,91%. Indeks Transparansi pengelolaan keuangan Daerah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelebihan dan kelemahan, diantaranya :
 - a. Faktor pendukung dari pencapaian target Indeks Transparansi pengelolaan keuangan Daerah yaitu dengan sudah memiliki web site dan perbaikan fasilitas internet yang memadai.
4. Dari pencapaian IKU yaitu Indeks Penyerapan Anggaran Daerah dari target 20, mencapai realisasi 10,00 dengan capaian indeks 50%. Indeks Penyerapan Anggaran Daerah tidak mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelemahan, diantaranya :
 - b. Faktor penghambat dari pencapaian target Indeks Penyerapan Anggaran Daerah yaitu Realisasi penyerapan belanja lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang tidak sesuai dengan target.
 - c. Solusi dari factor penghambat diatas yaitu mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan potensi dan proyeksi yang terukur dan mengalokasikan belanja yang efektif dan efisiensi yang prioritas.
5. Dari pencapaian IKU yaitu Indeks Kondisi keuangan Daerah dari target 6,5 mencapai realisasi 2,38 dengan capaian indeks 36,62%. Indeks Kondisi keuangan Daerah tidak mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelemahan, diantaranya :
 - a. Faktor penghambat dari pencapaian target Indeks Kondisi keuangan Daerah yaitu Adanya Realisasi PAD menurun dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19.



- b. Solusi dari factor penghambat diatas yaitu meningkatkan sumber dan potensi dari Pendapatan Asli Daerah dan mengutamakan program dan kegiatan yang prioritas dalam pemenuhan kebutuhan belanja.
6. Dari pencapaian IKU yaitu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah dari target WTP, mencapai realisasi **WTP** dengan capaian indeks 100%. Untuk Tahun 2021 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, mendapatkan Nilai WTP dengan indikator capaiannya baik yaitu "kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelebihan dan kelemahan, diantaranya :
- a. Langkah yang akan dilakukan untuk mempertahankan WTP ini adalah dengan meningkatkan komitmen dan perbaikan sistem pengendalian internal.
 - b. Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tepat waktu, akurat dan handal demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.
 - c. Dalam hal pencapaian target pendapatan efek Pandemi Covid-19 masih berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah terutama dari bidang pariwisata. Dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak.
 - d. Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan teknologi informasi sebagai pendukung utama dalam peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
 - e. Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
 - f. Untuk target belanja adanya refocusing sehingga pembelanjaan lebih dibatasi.
 - g. Adanya proses pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang sehingga tidak bisa dilaksanakan dan diselesaikan.



- h. Kurangnya SDM khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan SKPD secara kuantitas sehingga menyebabkan kurangnya penyerapan anggaran yang telah disediakan.
- i. Perlu penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran.
- j. Melakukan kaderisasi untuk SDM baru pengelola keuangan SKPD dan meningkatkan koedinasii pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.
- k. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2018 yang merupakan dokumen Kebijakan Akuntansi yang wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana Termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
- l. Pelaporan keuangan telah berbasis Akruwal (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang;
- m. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern;
- n. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah disusun berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 Tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali Laporan Keuangan. Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.



3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.1.6

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

	SASARAN STRATEGIS	Efisien/Tidak efisien	Alasan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Efisien	Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sudah bisa meminimalkan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sehingga tercipta akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Efisien	Adanya peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sehingga pengelolaan sumber daya sudah efisien dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.1.7 Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Tabel 3.1.7

Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	Program	Program yang tidak menunjang
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja organisasi pada tahun 2022 sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Realisasi Anggaran BKAD Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Keuangan			233.418.348.099		213.808.421.901		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	91%	9.202.491.576	78,46%	8.110.612.614	86,22	88,13
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	97%		100%		103,09	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85%		95%		111,76	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	92%		100,25%		108,97	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	95%	163.400.000	100%	94.965.500	105,26	58,12
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	95%		100%		105,26	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	95%		100%		105,26	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	96.000.000	6 Dokumen	42.700.500	150,00	44,48
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	67.400.000	4 Laporan	52.265.000	100,00	77,54
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	85%	6.109.186.378	100%	5.784.379.272	117,65	94,68
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.046.686.378	40 Orang/bulan	5.751.037.772	80,00	95,11
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	31.263.500	100,00	69,47
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	1.905.000	100,00	19,05
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	173.000	100,00	2,31
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	78%	45.000.000	70%	19.406.000	89,74	43,12
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	19.406.000	100,00	43,12
1.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	5%	2.800.000	0%	2.758.000	0,00	98,50
1.4.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	11 Dokumen	2.800.000	1 Dokumen	2.758.000	9,09	98,50
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	95%	99.800.000	100%	38.028.500	105,26	38,10
1.5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	99.800.000	4 Dokumen	38.028.500	80,00	38,10
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	92%	338.420.000	100%	251.795.359	108,70	74,40



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		% Kinerja	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	1 Paket	4.434.000	100,00	73,90
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	1 Paket	122.875.000	100,00	98,30
1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	3 Paket	24.592.100	100,00	81,97
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	5.850.000	100,00	83,57
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	170.420.000	38 Laporan	94.044.259	38,00	55,18
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	27%	568.483.250	96,45%	520.962.330	357,22	91,64
1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	42.000.000	1 Unit	39.656.250	100,00	94,42
1.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	158.300.096	90 Unit	149.850.000	120,00	94,66
1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	268.183.154	16 Unit	236.456.080	88,89	88,17
1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	3 Unit	95.000.000	150,00	95,00
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90%	1.048.437.044	100%	815.851.720	111,11	77,82
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	3.787.500	100,00	94,69
1.8.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	669.990.252	12 Laporan	578.055.220	100,00	86,28
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	374.446.792	12 Laporan	234.009.000	100,00	62,49
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	94%	826.964.904	100%	582.465.933	106,38	70,43
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	383.814.904	112 Unit	259.936.433	186,67	67,72
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit	22.000.000	24 Unit	14.060.000	32,00	63,91
1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	221.150.000	100 Unit	109.656.000	400,00	49,58
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	200.000.000	9 Unit	198.813.500	128,57	99,41
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	85%	219.025.939.364	92%	201.905.851.563	108,24	52,47
		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100		100		100,00	
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA	100%	4.456.940.000	100%	4.028.122.914	100,00	90,38
		Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100%		100%		100,00	



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Persentase skpd yang melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan anggaran	94%		100%		106,38	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	244.800.000	2 Dokumen	244.800.000	100,00	100,00
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	244.800.000	100,00	97,92
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36 Dokumen	309.210.000	16 Dokumen	306.000.000	44,44	98,96
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	324.522.500	35 Dokumen	313.200.000	100,00	96,51
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	379.390.000	21 Dokumen	368.194.500	60,00	97,05
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	429.380.000	35 Dokumen	377.100.000	100,00	87,82
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	563.700.000	33 Dokumen	515.293.765	1650,00	91,41
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Dokumen	762.040.000	8 Dokumen	676.087.879	66,67	88,72
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	429.000.000	1 Dokumen	380.483.000	25,00	88,69
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25 Dokumen	204.800.000	1 Dokumen	167.554.915	4,00	81,81
2.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	29 Dokumen	110.097.500	2 Dokumen	75.228.855	6,90	68,33
2.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	20 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	90.980.000	0,00	90,98
2.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Orang	350.000.000	35 Orang	268.400.000	100,00	76,69
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	85%	863.665.000	100%	800.419.650	117,65	92,68
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	482.075.000	12 Dokumen	473.331.500	100,00	98,19
2.2.5	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	35 Dokumen	217.538.000	35 Dokumen	201.239.150	100,00	92,51
2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4700 Dokumen	164.052.000	5697 Dokumen	125.849.000	121,21	76,71
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)	80%	2.064.535.000	92%	2.021.188.400	115,00	97,90
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	260.032.000	12 Laporan	252.500.000	100,00	97,10
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	12 Dokumen	45.500.000	12 Dokumen	41.030.500	100,00	90,18



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	dan Beban	Pendapatan-LO, dan Beban						
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	450.719.000	10 Laporan	432.679.000	83,33	96,00
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	832.299.000	9 Laporan	825.902.500	75,00	99,23
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen	475.985.000	12 Dokumen	469.076.400	100,00	98,55
2.3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00	0,00
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	87%	211.193.248.364	58,31%	194.693.381.599	67,02	51,01
2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	198.219.199.154	12 Laporan	190.622.597.013	100,00	52,54
2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	287.197.000	0 Laporan	0	0,00	0,00
2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	93 Laporan	12.686.852.210	93 Laporan	4.070.784.586	100,00	32,09
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100%	447.551.000	100%	362.739.000	100,00	81,05
2.5.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	96.799.000	12 Dokumen	57.096.500	100,00	58,98
2.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	350.752.000	20 Dokumen	305.642.500	166,67	87,14
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah	90%	4.534.412.159	100%	3.235.733.224	111,11	71,36
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	95%	4.534.412.159	100,01%	3.235.733.224	105,27	71,36
		Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar	100%		100%		100,00	
3.1.3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	37.558.919	1 Dokumen	15.446.000	100,00	41,12
3.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	45.335.000	100,00	90,67
3.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	89.665.000	1 Laporan	58.359.234	100,00	65,09
3.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.033.038.500	1 Laporan	1.012.642.208	100,00	98,03
3.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	660.464.750	9 Laporan	478.136.820	75,00	72,39



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
3.1.11	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	2.016.389.990	12 Dokumen	1.034.871.616	100,00	51,32
3.1.12	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	313.895.000	12 Laporan	273.444.460	100,00	87,11
3.1.13	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan	133.400.000	10 Laporan	117.497.886	83,33	88,08
3.1.14	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Orang	200.000.000	0 Orang	200.000.000	0,00	100,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	0%	655.505.000	0%	556.224.500	0%	84,85
		Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	0%		0%		0%	
		Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	0%		0%		0%	
4.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	0%	655.505.000	0%	556.224.500	0%	84,85
		persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	0%		0%		0%	
		Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	0Wajib Pajak		0Wajib Pajak		0%	
		persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	0%		0%		0%	
		Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	0Dokumen		0Dokumen		0%	
		Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	0%		0%		0%	
4.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	15.425.000	0 Dokumen	12.022.500	0,00	77,94
4.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	582.500.000	0 Dokumen	487.630.000	0,00	83,71
4.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0,00	0,00
4.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Unit	0	0 Unit	0	0,00	0,00
4.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	5.780.000	0 Laporan	5.780.000	0,00	100,00
4.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0,00	0,00
4.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0 Obyek Pajak	0	0 Obyek Pajak	7.000.000	0,00	0,00
4.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0 Dokumen	7.000.000	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	11.200.000	0 Layanan	10.192.000	0,00	91,00



No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		%	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
4.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0 Dokumen	33.600.000	0 Dokumen	33.600.000	0,00	100,00
4.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00
4.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0,00	0,00



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan semua pihak.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran 2022-2026 beserta perubahannya dan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022. Sedangkan permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Penyusunan anggaran dari awal perencanaan yang sudah ditetapkan belum selesai dengan perumusan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terdapat yang kurang sesuai dengan perencanaan, sehingga masih banyak pergeseran anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Untuk data perencanaan yang sudah menjadi dokumen yang disahkan dalam pelaksanaan anggaran mengalami perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan.
4. Untuk kebutuhan penyimpanan arsip yang semakin banyak karena kendala gedung yang masih belum ada.
5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diusulkan Perangkat Daerah belum sesuai dengan riil kebutuhan dilapangan.
6. Pelaksanaan penyertifikatan tanah tidak maksimal karena ATR/BNP Kabupaten Pangandaran sedang melaksanakan PTSL dan Redistribusi tanah yang menjadikan waktu dalam melaksanakan proses penyertifikatan menjadi lama/terlambat karena petugas BPN yang terbatas.
7. Proses pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak berat berupa Peralatan Kantor belum optimal karena tidak adanya pegawai yang memiliki Sertifikat Penilai/Penaksir.



8. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih terdapat selisih angka dalam neraca.
9. Dalam proses pencairan Ganti Uang (GU) masih terdapat SKPD yang belum melaksanakan rekonsiliasi keuangan, rekonsiliasi aset dan rekonsiliasi pajak.
10. APBD sebagai fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/subkegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum diimplementasikan dalam pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran.
11. adanya kegiatan yang muncul setelah ditetapkannya RKPD dan PPAS serta ada kegiatan yang bersifat mendesak.
12. Sistem aplikasi dalam proses pencatatan yang berubah karena trouble sistem aplikasi.
13. Kurangnya Sumber daya manusia pengelola keuangan.
14. Berubahnya nomenklatur Perangkat Daerah sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk program Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk realisasi hanya berjalan sampai dengan triwulan I.
15. Koordinasi yang kurang dengan perangkat daerah lainya dalam hal penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan dengan mengutamakan komitmen dan konsisten.
2. Perlu melakukan evaluasi bagi Perangkat Daerah yang belum sesuai dalam melaksanakan perencanaan kegiatan.
3. Mengikuti kebijakan dengan melaksanakan pergeseran anggaran.
4. Melaksanakan sewa bangunan gedung untuk gudang arsip.
5. Mengadakan sosialisasi dan koordinasi dengan tiap Perangkat Daerah dalam penyusunan RKBMD supaya sesuai dengan kebutuhan riil dilapangan.
6. Terus melaksanakan koordinasi dengan BPN dalam pelaksanaan proses penyertifikatan Tanah Milik Pemkab Pangandaran.
7. Mengirimkan atau melaksanakan diklat penilai/penaksir Aset daerah yang difasilitasi Kemendagri atau Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).



8. Perlu dilakukan rekonsiliasi antara SKPD, bidang aset dan bidang akap setiap bulannya.
9. Perlu dilaksanakan rekonsiliasi tersebut pada minggu pertama bulan berikutnya.
10. Melaksanakan APBD sebagai fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/subkegiatan pada tahun berkenaan dan melaksanakan APBD sebagai fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
11. menyusun regulasi tentang perencanaan, penganggaran serta teknis pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dan melaksanakannya sesuai aturan.
12. Melakukan pengembangan aplikasi untuk memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan pencatatan yang lebih mudah dengan penambahan fasilitas internet yang memadai.
13. Melakukan kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia pengelola keuangan dengan melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan diklat teknis tentang pengelolaan keuangan.
14. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada sesuai dengan sumber daya manusia yang ada.
15. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah khususnya dengan para pengelola keuangan untuk tercapainya penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pangandaran.